



Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi

Ghulam Zakiyyan Dzulqarnain ¹⁾; Dine Meigawati ²⁾; Yana Fajar Basori ³⁾

^{1, 2)} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: ¹⁾ ghulamzakiyyan@ummi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [28 Mei 2022]

Accepted [16 Juni 2022]

KEYWORDS

SDGs (Sustainable Development Goals), Poverty, Sukabumi City

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

SDGs (Sustainable Development Goals) memiliki 169 target, 319 indikator dan 17 tujuan dari 2015 sampai dengan 2030. SDGs (Sustainable Development Goals) sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dari 17 Sustainable Development Goals, salah satu SDGs (Sustainable Development Goals) yang selama ini paling mendapat perhatian adalah kemiskinan. Hal ini karena semua tujuan SDGs merupakan dorongan dan upaya untuk mencapai tujuan "tanpa kemiskinan". Jenis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara yang dilakukan di Kota Sukabumi, khususnya yang terlibat dalam implementasi rencana pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini pengentasan kemiskinan akan dibahas secara lebih rinci. Dalam rangka memaksimalkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) bebas kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi dengan SDGs penanggulangan kemiskinan mendapatkan formulasi penanganan yang berbeda sehingga topik kemiskinan yang sering ada tiap tahunnya bisa perlahan teratasi.

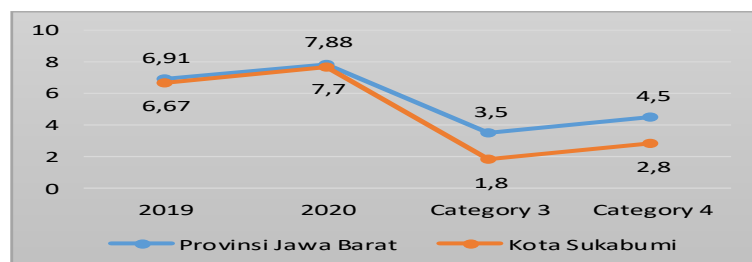
ABSTRACT

The SDGs (Sustainable Development Goals) have 169 targets, 319 indicators and 17 goals from 2015 to 2030. The SDGs (Sustainable Development Goals) are in line with the vision and mission of President Joko Widodo and Vice President Ma'ruf Amin. National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024. Of the 17 Sustainable Development Goals, one of the SDGs (Sustainable Development Goals) that has received the most attention so far is poverty. This is because all the goals of the SDGs are encouragement and efforts to achieve the goal of "no poverty". This type of research data uses qualitative methods. The data used in this study are primary and secondary data types. While the sources of data used in this study came from observations and interviews conducted in Sukabumi City, especially those involved in implementing sustainable development plans, in this case poverty alleviation will be discussed in more detail. In order to maximize the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) free of poverty, various efforts have been made to reduce poverty, but with the SDGs poverty reduction gets a different handling formulation so that the topic of poverty that often occurs every year can be slowly resolved.

PENDAHULUAN

Kemiskinan jika didefinisikan memiliki banyak arti dan konsep, termasuk interpretasi multidimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, serta ukuran kemiskinan dari sudut ekonomi (*money approach*). Secara keseluruhan, angka kemiskinan di Kota Sukabumi mengalami penurunan baik jumlah maupun persentase dari tahun 2010 hingga 2020, namun meningkat pada tahun 2015. Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan penduduk dunia, termasuk Indonesia khususnya di Kota Sukabumi.

Grafik 1. Presentase Tingkat Kemiskinan di Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020



Sumber : Peneliti, 2022

Menurut BPS Kota Sukabumi, peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi. Pada tahun 2020, penduduk miskin Kota Sukabumi mencapai 25,42 ribu (7,70%). Dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan meningkat sebesar 3,55 ribu, meningkat 16,23%. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin Maret 2020 sebanyak 3,92 juta jiwa, dan Maret 2019 sebanyak 3,4 juta jiwa. Presentasi penduduk miskin di Kota Sukabumi mengalami peningkatan dari 6,67% pada tahun 2019 menjadi 7,79% pada tahun 2020. Sementara itu, Jawa Barat meningkat dari 6,91% pada 2019 menjadi 7,88% pada 2020.

Menurut LP2KD Kota Surakarta, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan rata - rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Maka semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula kesenjangan.

Grafik 2. Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2018-2020



Sumber : Peneliti, 2022

Dalam satu tahun ke belakang, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Sukabumi mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018-2019 P1 Kota Sukabumi cenderung stabil sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan diatas dari P1 Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran penyebaran pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, maka semakin tinggi ketimpangannya (LP2KD Kota Surakarta 2018). diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2020 keparahan kemiskinan Kota Sukabumi mengalami penurunan sebesar 0,10 persen dari yang sebelumnya 0,32 persen kini berada di posisi 0,22 persen. Untuk itu selain memperkecil jumlah penduduk miskin, maka kebijakan untuk mengurangi tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) kemiskinan juga harus diperhatikan. Tiap tahunnya masalah kemiskinan sering kali menjadi topik permasalahan yang selalu dibicarakan, hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah karena menanggulangi kemiskinan harus dengan strategi dan kesiapan yang matang. Maka peran pemerintah disini sangatlah sentral guna menyeimbangkan permasalahan ini sehingga terciptalah program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dimana terdapat di poin pertama dalam aspek sosial yaitu “tanpa kemiskinan” dengan adanya program ini artinya pemerintah harus dapat menjalankan segala usaha nya dengan menerapkan konsep ini serta sejalan dengan visi misi yang sudah ditentukan. Jika semua sudah terwujud bukan tidak mungkin kemiskinan di Kota Sukabumi mengalami penurunan.

Tapi dalam hal ini, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan SDGs khususnya dalam poin 1 SDGs yaitu “tanpa kemiskinan”. Direktur Riset Indef Berly Martawardaya menuturkan tingkat pengentasan kemiskinan semakin melambat. Selama 2012-2019, pemerintah hanya dapat mengurangi kemiskinan sekitar 0,5% setiap tahun. Ia menilai pemerintah harus fokus pada kemiskinan. Karena akan mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Ia membandingkan upaya Indonesia dengan negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti India, Vietnam, Sri Lanka, dan



Mongolia. Data yang dimaksud adalah untuk tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Berly menekankan bahwa data dapat mencerminkan situasi di lapangan. Dalam hal ini, daerah mana yang maju atau tertinggal. Melalui data, banyak hal yang bisa dipercepat

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwasanya setiap daerah sudah harus mulai mengimplementasikan program SDGs guna tercapainya tujuan di tahun 2030 nanti serta menyesuaikan dengan RPJMN yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan SDGs di Jawa Barat sudah mulai berjalan melalui beberapa kegiatan pembangunan yang dikaitkan dengan indikator-indikator SDGs seperti yang sudah tertuang pada Pergub No. 18 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan global yang dilaksanakan dalam pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berperan untuk membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah daerah memiliki dana dan berwenang untuk melakukan inovasi dalam bentuk pelayanan publik dan kebijakan lainnya.

LANDASAN TEORI

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada publik sehingga kebijakan tersebut dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Rangkaian kegiatan ini meliputi: Pertama, pengembangan seperangkat peraturan lebih lanjut sebagai interpretasi kebijakan. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk mendorong kegiatan implementasi, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja, mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan. 3. Bagaimana menyampaikan kearifan konkrit kepada masyarakat. Sedangkan Menurut Agustino (2014:139) Implementasi merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan dan pada akhirnya akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri." Donald S. Van Meter dan Carl E. Vanhorn (1975:447), proses implementasi adalah arah yang diambil individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan ketika mengimplementasikan suatu kebijakan, dan tentunya mengimplementasikan suatu kebijakan harus sesuai dengan peraturan. Sejalan dengan pendapat tersebut Menurut Mazmanian, D.A dan Paul A. Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mengemukakan Implementasi sebagai berikut:

"Implementation of the basic policy decision, usually in the form of laws, but can also form commandments or the decision important executive or judicial bodies or decision. Typically, this decision identifies the problem you want addressed, explicitly mention the purpose or objectives to be achieved, and various ways to structure or organize the implementation process". (Mazmanian, 1983:61).

Merujuk pada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dipahami bahwa Implementasi adalah kegiatan yang terlihat setelah arahan hukum suatu proyek, yang mencakup upaya untuk mengelola input. Implementasi adalah implementasi dari ide atau rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Konsep pelaksanaan yang dianggap masyarakat berkaitan dengan suatu kegiatan atau tindakan. Namun, implementasinya tidak terbatas pada tindakan mengimplementasikannya. Implementasi juga merupakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan kerja. Penerapan biasanya juga mengacu pada aturan tertentu yang mendukung alur kerja. Jika rencana yang akan diimplementasikan telah dikembangkan, diteliti atau dirancang dengan cermat, proses implementasi baru dapat diimplementasikan. Hal ini penting agar proses implementasi berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik. Proses implementasi baru kemudian dianggap selesai ketika sistem yang diterapkan telah dinilai dengan benar dan diterapkan secara permanen pada pekerjaan. Menurut Tayibnaxis (2008: 9), program merupakan segala sesuatu yang dicoba dilakukan seseorang dengan harapan akan ada akibat atau hasil. Berdasarkan beberapa ahli, Arikunto (2008:291) menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu program, lihatlah rangkaian kegiatan yang terjadi secara berurutan, bukan dari satu kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang singkat, program ini merupakan satu kesatuan sistem. Menurut Widoyoko (2009:8), program merupakan rangkaian kegiatan yang hati-hati dan berkelanjutan. Tayibnaxis (2008) menawarkan pandangan yang berbeda tentang definisi program, yaitu segala sesuatu yang dilakukan orang dengan harapan membawa hasil atau kesuksesan. Definisi dari para ahli yang sudah disebutkan diatas, maka dapat diketahui bahwa secara umum

pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian dan mengetahui bagaimana implementasi program SDGs dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi, peneliti menggunakan metode dan berbagai cara untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu, metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam bukunya yang berjudul *Research Design* (2016:4-5) Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok tertentu untuk masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pekerjaan yang signifikan, seperti merumuskan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, dan belajar dari spesifik. Topik untuk menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna data pada topik umum. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian kualitatif ini harus mengadopsi perspektif penelitian induktif, fokus pada makna pribadi, dan menerjemahkan kompleksitas masalah. Peneliti memberikan batasan dalam kajian penelitian yang berfokus pada permasalahan dan pertanyaan pokok penelitian, yaitu bagaimana Implementasi program SDGs dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi. Karena implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan, upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Dalam mengukur penelitian kali ini, peneliti menggunakan 6 dimensi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu (1) *Standard and objectives*, (2) *Resources*, (3) *Characteristics of the implementing agencies*, (4) *Interorganizational communication and enforcement activities*, (5) *Economic, social, and political conditions*, dan (6) *The disposition of implementors*.

Kemudian dalam menentukan informan pada usulan penelitian ini yaitu menggunakan rancangan *non probability sampling* dengan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal tersebut dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, oleh karena itu mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiono (2019:289). Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan cara observasi, kemudian melakukan wawancara dan dokumentasi yang semuanya bersangkutan dengan implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. Kemudian pada saat menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data, dimana data tersebut berkaitan dengan proses pemilihan data, dengan penekanan pada penyederhanaan data yang ditemukan di lapangan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data, yang merupakan proses penting. Penyajian data merupakan hasil dari berbagai kumpulan informasi atau data yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Akhirnya sampai pada kesimpulan, yang merupakan tahap akhir dari proses penelitian, memberi makna pada data yang telah dianalisis dan divalidasi. Validasi sendiri merupakan pemikiran ulang para analis saat menulis Miles dan Huberman (2014:16-19).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, peneliti memberikan pertanyaan tentang latar belakang pelaksanaan program SDGs di Kota Sukabumi dan tujuan-tujuan yang belum dan sudah dicapai. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan dari suatu kebijakan tentu sangat mempengaruhi. Sebagaimana surat keputusan yang dikeluarkan oleh walikota, hal ini menegaskan bahwa Kota Sukabumi memiliki keinginan untuk dapat mengikuti program SDGs ini seperti yang sudah diimplementasikan dengan baik oleh kota-kota lain di Indonesia yang dimana dengan adanya program SDGs ini pemerintah dan masyarakat bisa mulai tersadar akan permasalahan dan bagaimana solusinya, serta dapat dijadikan kolaborasi bukan hanya sebatas formalitas untuk memenuhi indikator penilaian dan tentu tujuan utama dari program SDGs dalam aspek kemiskinan ini menjadikan seluruh penduduk bumi *no poverty* atau tanpa kemiskinan di tahun 2030 nanti. Ukuran tujuan dalam implementasi program SDGs dalam aspek penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi diketahui namun tidak dipahami secara mendalam oleh para pelaksana dan sasaran kebijakan yang mengakibatkan dalam pelaksanaannya hanya sebagai pemenuhan indikator saja. Dari hasil analisis di atas maka apabila mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan ukuran dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian ukuran dan tujuan tersebut.



2. Sumber Daya

Dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan secara mendalam mengenai pelaksanaan program SDGs dari aspek baik itu dari anggaran maupun kualitas SDM. Dari hasil wawancara, dapat diinterpretasikan bahwa Sumber daya Manusia untuk pelaksanaan program SDGs sudah cukup baik, akan tetapi untuk pemahaman SDGs masih belum ke arah yang seharusnya sehingga SDGs hanya dijadikan sebuah nama tidak dikaji mendalam mengenai maksud dan tujuannya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah salah satu sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pada tahapan-tahapan tertentu selama proses implementasi, tergantung pada pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan untuk kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi ketika kapasitas sumber daya ini nol, maka kinerja kebijakan publik hampir tidak dapat diharapkan untuk berhasil. Khususnya dalam penelitian ini, SDM yang ada sudah baik akan tetapi belum sempurna mengarah kepada program SDGs, sehingga perlu ada perbaikan agar nantinya tujuan yang diinginkan bisa selaras dengan implementasi yang dilakukan. Sumber daya lain yang perlu dipertimbangkan adalah sumber daya keuangan dan sumber daya waktu. Karena suka atau tidak suka, ketika sumber daya manusia yang mampu dan kompeten tersedia dan anggaran tidak, maka mencapai tujuan kebijakan publik adalah hal yang kompleks. Hal yang sama berlaku untuk sumber daya waktu, ketika sumber daya manusia aktif bekerja dan dana berjalan dengan baik, tetapi waktu terlalu sempit, ini juga dapat menjadi penyebab implementasi kebijakan yang buruk. Dalam implementasinya di Jawa Barat, SDGs hanya sebagai pemenuhan data saja selebihnya terkait program mengikuti instansi yang masuk sesuai dengan indikator pada 17 tujuan Program SDGs. Tentunya hal ini perlu adanya perhatian, karena untuk mencapai target di tahun 2030 nanti perlu adanya kesiapan yang cukup matang baik itu dari segi SDM, anggaran, dan sebagainya.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Pada dimensi kali ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana komunikasi yang dilakukan antar organisasi dan aktifitas pelaksana dalam program SDGs khususnya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan program SDGs khususnya penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi masih belum berjalan secara optimal, masih banyak hal yang perlu diperbaiki baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Tentunya hal ini dilakukan agar tujuan yang ingin dituju dapat dipahami dan dilaksanakan secara selaras oleh instansi yang terkait. Konsistensi dalam komunikasi akan membuat kebijakan menjadi serius dan tegas. Ketegasan dan keseriusan yang ditunjukkan oleh sebuah kebijakan, setidaknya masyarakat akan mengapresiasinya dengan ikut serta dan peduli terhadap bagaimana kebijakan tersebut berjalan. Di sisi lain, jika kebijakan tidak konsisten, terutama dalam proses komunikasi, respon masyarakat akan terbukti negatif dan dapat menjadi penghambat pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi antara kegiatan pengorganisasian dan pelaksanaan merupakan mekanisme yang kuat dan sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan publik. Karena semakin baik komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, semakin kecil kemungkinan kesalahan asumsi dan proses pencapaian tujuan kebijakan akan semakin mudah.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan uraian dari wawancara yang sudah dilakukan bahwa dapat peneliti interpretasikan, bahwa dalam pelaksanaan implementasi program SDGs di Kota Sukabumi sudah terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurangnya pemahaman akan pedoman yang ada, padahal sudah seharusnya mereka memahami hal ini agar SOP atau pedoman yang ada tidak hanya berbentuk pedoman aja tapi bisa berupa pemahaman yang mendalam agar nantinya implementasi dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn, Karakteristik agen pelaksana yang selanjutnya menjadi pusat perhatian dimana kinerja implementasi kebijakan (publik) akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang benar dan dicocokkan dengan para pelaksana. Demikian pula, implementasi kebijakan publik berusaha untuk mengubah perilaku manusia secara mendasar, dan radikal. Maka para pelaksana proyek harus memiliki karakteristik yang keras dan secara ketat mematuhi aturan dan sanksi hukum. Pada saat yang sama, jika kebijakan publik tidak mengubah perilaku dasar manusia terlalu banyak, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Semakin luas implementasi kebijakan, semakin banyak agen dengan karakteristik yang

tepat. Maka daripada itu, karakteristik agen pelaksana sangat perlu diperbaiki yang nantinya dapat menjadi kunci agar tujuan yang diinginkan bisa sesuai dengan arah pergerakan yang dilakukan.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dapat diinterpretasikan bahwa dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik erat hubungannya dengan pelaksanaan program. Capaian indikator yang ingin diraih tentu harus sejalan dengan rencana kerja dari siapapun yang memimpin, seluruh elemen harus saling memahami kondisi, agar tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaannya sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat terwujud. Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan. Perspektif lingkungan eksternal yang diberikan oleh Van Metter dan Van Horn berkontribusi pada keberhasilan kinerja yang telah direncanakan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

6. Sikap atau Kecenderungan Pelaksana

Dalam dimensi ini peneliti ingin mengetahui bagaimana sikap pelaksana terhadap program SDGs dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi. Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai dimensi ini dapat disimpulkan bahwa Sikap/kecenderungan pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Situasi ini sangat mungkin terjadi karena implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh masyarakat setempat yang sangat sadar akan masalah dan perasaan mereka. Namun kebijakan yang akan dilaksanakan bersifat "top down" dan pembuat kebijakan mungkin tidak pernah mengetahui atau bahkan menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang ingin ditangani masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai pelaksanaan program SDGs dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975), memberikan suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan SDGs di Kota Sukabumi diketahui oleh para pelaksana sehubungan dengan adanya surat keputusan pokja yang dikeluarkan oleh walikota akan tetapi belum terlalu dipahami mengenai SDGs lebih mendalam sehingga perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai arti dari SDGs secara komprehensif.

2. Sumber Daya

Sumber daya anggaran pada pelaksanaan program SDGs ini mengalami beberapa permasalahan salah satu pandemi covid 19 yang memberikan permasalahan bagi para pelaksana dengan adanya *refocusing* anggaran sehingga berpengaruh pada jalannya pelaksanaan program SDGs ini. Hal ini berdampak pada SDM yang mengalami keterbatasan jumlah, sehingga dalam pelaksanaan menggunakan SDM seadanya akan tetapi untuk kualitas sudah diatas rata-rata.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang dilakukan belum optimal, karena masih adanya formalitas saja pada pelaksanaannya sehingga dalam pelaksanaan masih sering mengalami hambatan. Untuk sosialisasi pun hanya dilakukan formalitas saja tidak secara terfokus.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaksanaan masih didasarkan sesuai instansi masing-masing, padahal untuk pedoman dari SDGs sendiri sudah ada, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak ada pengarahan lebih lanjut.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program SDGs karena banyak relawan yang membantu sehingga pelaksanaan bisa berjalan sesuai yang diharapkan, untuk aspek ekonomi



tentu SDGs ini memang dari awal sudah di konsep untuk kesejahteraan masyarakat jadi sangat bermanfaat. Terakhir, untuk aspek politik memang sebuah hal yang saling berhubungan antara program SDGs dengan rencana dari tiap kepemimpinan.

6. Sikap atau Kecenderungan Pelaksana

Tentunya dalam hal ini para pelaksana sangat antusias dengan program ini akan tetapi keterbatasan pemahaman membuat ada sedikit hambatan yang mungkin nantinya tinggal diperbaiki pola dan dukungan tambahan dari Pemerintah Kota Sukabumi.

Saran

Peneliti berharap penelitian ini dapat lebih dikembangkan dan dikaji lagi lebih mendalam dan dikaitkan dengan aspek keilmuan yang terbaru untuk penelitian selanjutnya tentunya dengan perubahan yang terjadi di tahun-tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin .2008 . *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Abdullah,Syukur.M. 1988. *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara RI.
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Amirulloh, dkk. (2021). *Panduan Ristik, Seminar, Komprehensif, Skripsi dan Publikasi Ilmiah (Pada Kurikulum MBKM)*. Sukabumi: UMMIPress
- Arikunto, Suharsimi., dkk. 2008. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bappenas (2021). Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/> (diakses pada 10 November 2021)
- Chambers, Robert, (1983). *Rural Development, Putting the Last First*, Longman: London.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design : Qualitative Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. Los Angles: SAGE Publications, Inc.
- Draf Pergub tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat 2018-2023
- Draf SK Kepala Bappeda tentang Pembentukan Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat *Jabar Pojok Satu* (2021), Retrieved from <https://jabar.pojoksatu.id/sukabumi/2021/10/07/jumlah-penduduk-miskin-di-kota-sukabumi-semakin-bertambah/> (diakses pada 15 November 2021)
- Kartasasmita, Ginanjar, (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidessindo: Jakarta.
- Localise SDGS Indonesia* (2021), Retrieved from <https://localisesdgs-indonesia.org/> (diakses pada 30 Oktober 2021)
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Medcom* (2021), Retrieved from <https://www.medcom.id/ekonomi/sustainability/ZkeB8gqK-kemiskinan-masih-jadi-tantangan-penerapan-sdgs> (diakses pada 15 November 2021)
- Nopirin. (2016). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : BPFE
- Parsudi, Suparlan. (2017). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
- Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Pergub No. 18 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
- Rustanto, Bambang dkk. 2010. *Membangun Organisasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Bandung: STKSPRESS
- S.Eko Putro Widoyoko. 2009. *Evaluasi Program Pembelajaran*.Yogyakarta ; Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2018. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tayibnapi, Farida Yusuf., 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, Jakarta. PT. Rineka Cipta, cet. Ke-1

Tribunnews (2021), Retrieved from <https://jabar.tribunnews.com/2020/12/18/angkanya-naik-terus-kini-di-kota-sukabumi-sebanyak-95377-orang-menganggur> (diakses pada 15 November 2021).
Van Meter Dan Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration And Society*. Sage, London Vol.6 No.4